

BAB I

PENDAHULUAN

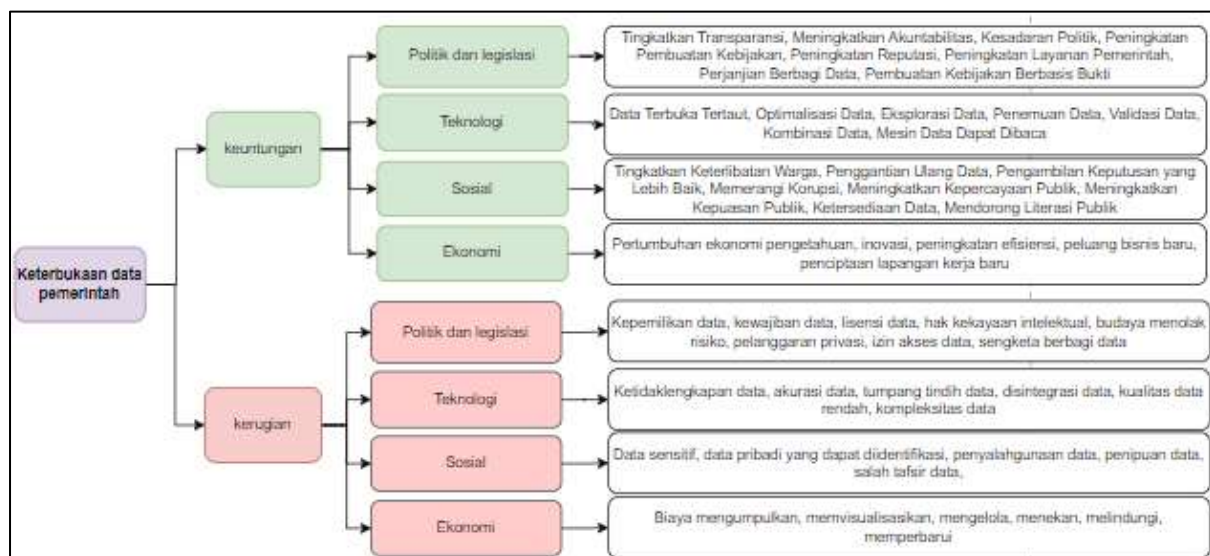
1.1 State of The Art

OGD merupakan konsep yang mengintegrasikan antara pemerintahan terbuka dengan data terbuka. Pemerintahan terbuka didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan transparansi, kolaborasi dan partisipasi publik. Sementara itu, data terbuka merujuk pada data yang dapat digunakan dengan bebas untuk berbagai tujuan (Wirtz dkk., 2022a), serta didistribusikan kembali oleh siapa saja tanpa ada batasan tertentu (Calzati & Van Loenen, 2023), dengan kategori data yang dipublikasikan seperti data komersial, pendaftaran hak paten dan data, geografis, hukum, meteorologi, sosial, dan transportasi (Wirtz dkk., 2022a). Tujuan dari keterbukaan data tersebut yaitu untuk memberikan manfaat atau nilai jangka panjang (Jetzek dkk., 2019a) seperti menyebarluaskan pembaharuan teknologi, mengidentifikasi inovasi, memfasilitasi pembelajaran, menyelesaikan permasalahan organisasi, melakukan integrasi antara organisasi dengan pemerintah (Ruijter & Meijer, 2020), inovasi, peluang bisnis, serta meningkatkan layanan publik (Gao & Janssen, 2022).

Konsep OGD tersebut berkembang dari tahun ketahun (Wirtz dkk., 2022a), yang bermula pada tahun 2011 dan meningkat signifikan sejak tahun 2014 dengan penelitian kualitatif sebanyak 107 studi dan penelitian kuantitatif sebanyak 62 studi. Hal tersebut terus meningkat untuk tahun 2016 dan tahun 2017, akan tetapi studi mengenai OGD mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak dari COVID-19. Studi terdahulu menunjukkan untuk penelitian kualitatif berfokus pada pendekatan komparatif dan penelitian kuantitatif dengan menggunakan *structural equation modeling* (SEM), dengan perbandingan studi untuk kualitatif sebesar 61,54% dan kuantitatif sebesar 18,93%. Ketidak seimbangan antara dua jenis penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penelitian tentang konsep OGD masih berkembang dengan fokus utama pengembangan dalam kepuasan publik, kebijakan dan faktor pendorong atau penghambat dalam melakukan implementasi.

Perkembangan penelitian mengenai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berdasarkan (Wirtz dkk., 2022a) ditentukan oleh tingkat keterbukaan pemerintah dalam mempublikasikan data. Keterbukaan ini memungkinkan publik untuk memantau kinerja pemerintah, yang pada akhirnya membentuk ekspektasi bahwa pemerintah akan memenuhi kepentingan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Faktor lain yang untuk meningkatkan kesuksesan implementasi data terbuka berdasarkan (van Donge dkk.,

2022), berfokus pada faktor-faktor yang berpengaruh dan mekanisme peningkatan kinerja data terbuka dengan fokus pada sumber daya internal (keuangan, organisasi, budaya, dan hukum), tekanan eksternal (pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, pemerintahan horizontal, dan media), memperkuat struktur organisasi dan peran kepala data officer, dan administratif untuk perbaikan yang tepat. Sedangkan untuk perkembangan mengenai faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi yang dilakukan oleh (Luthfi, 2021), berfokus kepada empat aspek publik dan legislasi, teknologi, sosial serta ekonomi. Seluruh Faktor tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Keuntungan dan Kerugian dalam Menerapkan OGD (Luthfi, 2021)

Perkembangan mengenai kebijakan dalam implementasi OGD dipengaruhi oleh aspek politis kompleks yang berketerkaitan dengan lingkungan lainnya. Berdasarkan penelitian oleh (Ruijter dkk., 2020a), keterlibatan kebijakan dalam melakukan rilis data kepada publik secara sengaja hanya terbatas pada informasi yang tidak beresiko dan tidak mengungkapkan informasi di domain lainnya. Penyebab tentang keterbatasan pengungkapan informasi tersebut disebabkan lima faktor institusional yaitu penyebab, konstituen, isi, kontrol dan konteks. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah cenderung melaksanakan praktik OGD apabila terdapat peraturan yang berlaku dan banyaknya konstituen dengan legitimasi tinggi yang enggan melaksanakan praktik OGD. Tantangan lain yang dihadapi yaitu hambatan yang terjadi dalam internal dan eksternal suatu organisasi, ketersediaan sumber daya, pemeliharaan data, dan kurangnya pengetahuan (Wiedenhöft, Alexopoulos, dkk., 2023). Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dibutuhkan pengembangan atau perubahan pada peraturan hukum (Ruijter & Meijer, 2020), mekanisme kemitraan dalam melakukan berbagi data berdasarkan tujuan dan kepentingan (Susha dkk., 2023), dan melakukan perancangan

dengan menggabungkan aspek konstruksi konseptual, kerangka teknologi-organisasi-lingkungan, serta model keberhasilan sistem informasi (Alhujaylan dkk., 2020).

Berbagai macam indikator keberhasilan implementasi data terbuka tersebut dapat dicapai dengan pengembangan tolak ukur data terbuka, dengan membandingkan berbagai macam metrik dan metodologi untuk mengukur, dan memberi peringkat kemajuan pemerintah dalam inisiatif data terbuka seperti perusahaan, untuk mengeksplorasi ide pengukuran baru, kemampuan transfer lintas domain, dan aspek pelengkap dari data terbuka yang relevan (Zuiderwijk dkk., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pengembangan instrumen manajemen OGD, dengan menggabungkan beberapa tolak ukur atau instrumen yang telah ada untuk keterbaruan penilaian yang dapat digunakan untuk seluruh instansi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

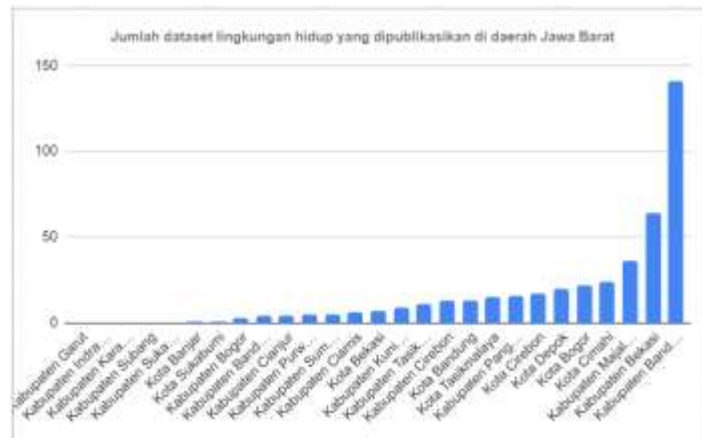
Open Government Data (OGD) merupakan konsep yang mengintegrasikan antara pemerintahan terbuka dengan data terbuka. Konsep tersebut digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan transparansi dan memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintahan. Seiring waktu, konsep tersebut mengalami perkembangan di berbagai negara terutama di negara berkembang (Wirtz dkk., 2022a). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Pasifik yang telah mengadopsi OGD melalui program Satu Data Indonesia (SDI). Meskipun Indonesia merupakan negara awal yang mengadopsi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, hal ini belum mampu mendorong Indonesia untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tersebut (Bernot dkk., 2024). Hal tersebut dibuktikan berdasarkan laporan yang dirilis oleh (Open Knowledge Foundation, 2016), menunjukkan perbandingan peringkat pengelolaan OGD di seluruh dunia dengan negara Indonesia berada di urutan ke-61 dengan skor sebesar 25%.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI VI 2020-2022) yang dipublikasikan oleh *Open Government* Indonesia (OGI) dalam mewakili komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan transparansi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 pasal 11, akan tetapi dalam pelaksanaan SDI terdapat berbagai macam hambatan yang terjadi seperti tantangan teknis dan non teknis. Tantangan teknis yaitu kinerja pelayanan infrastruktur tidak merata, beragam aplikasi dan standar data, metodologi tata kelola data belum terstandar, tidak adanya dokumen formal dan

fasilitas berbagai pakai. Tantangan non teknis, yaitu tidak adanya kesadaran akan data, kurangnya inisiatif kepemimpinan, adanya ego sektoral dan belum adanya kebijakan seta strategi pemanfaatan data. Selain itu, terdapat hambatan institusional dan kualitas informasi (Jacob dkk., 2019).

Hambatan institusional terdiri dari konflik antara birokrasi tradisional dan OGD, dan kurangnya kolaborasi antar institusi atau departemen. Selain itu, hambatan kualitas informasi terdiri dari data yang tidak terstruktur dan informasi yang dipublikasikan kepada publik, tidak diperbaharui secara berkala. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berdasarkan Keputusan. 68/M.PPN/HK/08/2024 tentang pedoman penyelenggaraan forum SDI telah mengatur penyelenggaraan SDI di tingkat pusat maupun daerah melalui forum data. Keterhubungan antara tingkat daerah kepada pusat yaitu setiap daerah wajib melakukan pelaporan dan koordinasi secara langsung kepada forum SDI tingkat pusat. Meskipun struktur dan mekanisme penyelenggaraan SDI telah dirancang secara sistematis, akan tetapi pada pelaksanaan tingkat daerah pada walidata dan produsen data memiliki banyak hambatan. Salah satu daerah yang memiliki permasalahan untuk penyelenggaraan di tingkat daerah yaitu kota Bandung.

Permasalahan tersebut terjadi berdasarkan wawancara singkat terhadap dua instansi yang berperan sebagai walidata dan Produsen data dengan obyek dinas Diskominfo Serta DLH, yaitu kurangnya sumber daya yang melakukan pengelolaan, proses penyerahan sampai dengan publikasi data yang membutuhkan waktu lama, dan pengelolaan teknologi yang tidak efektif. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yudan & Arief Virgy, 2021), (Syafira dkk., 2022), dan (Almeyna Kurnia dkk., 2023.), tentang permasalahan implementasi yaitu tidak adanya standarisasi data, kurangnya sosialisasi, tidak adanya kesepakatan formal, tumpang tindih penggunaan aplikasi yang berbeda, dan birokrasi yang rumit. Selain itu, peneliti melakukan survei awal terkait ketersediaan data pada portal data kota satu data kota Bandung. Permasalahan pengelolaan OGD di kota Bandung (Yudan & Arief Virgy, 2021), berdasarkan jenis kualitas informasi yaitu pelaksanaan pembuatan dataset yang minim. Contoh kekurangan terhadap ketersediaan dataset yang dipublikasikan oleh kota Bandung pada konteks lingkungan hidup, jika dibandingkan dengan wilayah lain berdasarkan portal data Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Berdasarkan grafik dataset lingkungan hidup yang tersedia di wilayah Jawa Barat, kota Bandung menempati urutan ke-18 dalam publikasi data di Jawa Barat, dengan hingga 14 jumlah data. Selain itu, penelusuran data yang dilakukan pada laman Portal Data Kota Bandung dengan tujuan DLH Kota Bandung, layanan ini hanya menerbitkan 13 jumlah data. Pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa data diperbarui hanya pada tahun 2022, dan satu data yang diperbarui pada tahun 2023. Evaluasi jumlah data tidak dilakukan secara komprehensif dan teratur, terbukti dengan adanya perbedaan periode evaluasi, sebanyak delapan jumlah data dievaluasi pada tahun 2019, tiga jumlah data pada tahun 2020, satu jumlah data pada tahun 2022, dan satu jumlah data pada tahun 2023. Temuan lain terkait dengan ketersediaan jumlah data yang dirilis ke publik. Hanya enam jumlah data yang memiliki ketersediaan 100%, sementara yang lain memiliki 75%, 50%, atau kurang dari 50%. Dapat disimpulkan bahwa masalah utama terhadap jumlah dataset yang dipublikasikan adalah jumlah jumlah data yang tidak diperbarui dan dievaluasi secara konsisten, serta jumlah jumlah data yang ketersediaannya di bawah rata-rata.

Permasalahan tersebut terjadi berdasarkan (Yudan & Arief Virgy, 2021), yaitu kurangnya kolaborasi antar pihak yang berkepentingan dalam penyediaan data. Kurangnya kolaborasi tersebut dapat terlihat dari publikasi data yang dilakukan oleh produsen kepada walidata. Jumlah data yang tersedia pada walidata leboh sedikit, jika dibandingkan dengan dataset yang dilaporkan dari produsen data kepada instansi yang sama dengan tingkatan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat terlihat pada laporan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), memuat beberapa data yang dipublikasikan kepada publik, seperti data pengelolaan lingkungan dan capaian pengelolaan, capaian indikator kinerja, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja, dan capaian DLH Renstra Kota Bandung.

Berdasarkan berbagai macam permasalahan tentang pengelolaan OGD tingkat pusat sampai dengan daerah di Indonesia, diperlukan upaya yang secara sistematis untuk melakukan evaluasi, agar memenuhi konsep OGD tentang ketebukaan pemerintah dan transparansi data. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyusunan instrumen penilaia OGD dengan sasaran daerah untuk melakukan identifikasi permasalahan saat ini dan solusi obyektif yang dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan instrumen penilaian OGD tingkat daerah dengan menggunakan undang – undang sebagai dasar konstitusi yang berlaku saat ini untuk mengatur tata laksana antar lembaga dan benchmarking terhadap instrumen lainnya untuk penyusunan instrumen yang komrehensif dan terpadu.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan untuk penyusunan instrumen penilaian OGD antar instansi di Indonesia, terdiri dari dua jenis, yaitu;

a. Permasalahan Praktis

Pengelolaan OGD data di kota Bandung dilakukan oleh beberapa penyelenggara, yaitu pembina data, walidata dan produsen data yang berkerjasama dalam pengumpulan, pengelolaan dan publikasi data. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung. Selain itu, pengelolaan OGD merupakan bagian dari sasaran *smart city* kota bandung dalam hal publikasi seluruh data untuk mendukung produktifitas nasional, dan *smart environment* yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup kota. Akan tetapi, setelah peneliti melakukan identifikasi awal mengenai permasalahan pengelolaan OGD, dengan tujuan instansi Diskominfo sebagai Walidata dan DLH

sebagai produsen data dalam bidang lingkungan hidup, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, dan dipetakan kedalam manusia, proses dan teknologi, serta ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Permasalahan Pengelolaan OGD pada Tingkat Daerah

Komponen	Produsen data	Walidata
Manusia	Hanya terdapat dua staff sebagai pengelolaan teknologi informasi dan data, sehingga pembagian tugas dan beban kerja sulit dilakukan, karena keterbatasan sumber daya manusia.	Terbatasnya sumber daya untuk mengelola data yang bersumber dari seluruh dinas di kota Bandung.
Proses	Pengumpulan, pengelolaan dan penyerahan data dari produsen kepada walidata membutuhkan waktu yang lama, dengan hambatan, yaitu; 1. Data yang dikumpulkan dari sumber data, terdapat beberapa mekanisme seperti uji lab untuk data air, data udara yang harus dikumpulkan dalam durasi waktu yang lama, dan data sampah dikumpulkan dari beberapa tempat. 2. Data yang bersumber dari mesin dan uji lab harus diolah terlebih dahulu, untuk memisahkan data bersifat pribadi, sebelum diserahkan kepada walidata. 3. Pelaporan data harus dilakukan kepada dua instansi yaitu walidata dan instansi dinas provinsi, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sinkronisasi data.	1. Data yang diberikan oleh perangkat daerah seringkali berbentuk dalam data mentah, sehingga walidata membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengelola data. 2. Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah dengan walidata, sehingga kendala mengenai pengelolaan data tidak teratasi secara langsung. 3. Tidak adanya aturan terkait pengelolaan data lintas instansi, sehingga validasi dan konten data diserahkan kepada produsen data atau masing – masing perangkat daerah.
Teknologi	Data dan informasi masih dikelola melalui Gdrive dan tidak memanfaatkan fasilitas satu data untuk instansi menyerahkan data kepada walidata.	Teknologi terkait pengelolaan data telah tersedia, akan tetapi, untuk penggunaan teknologi tersebut di produsen data, dikembalikan kepada masing – masing perangkat daerah.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa hambatan yang terjadi terkait pengelolaan OGD antara produsen dan walidata dalam konteks manusia, proses, dan teknologi. Selain itu, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu pada Google Scholar terkait pengelolaan OGD di kota Bandung, yang ditunjukkan pada Tabel 1.2

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu tentang Pengelolaan OGD di Kota Bandung

Penulis	Tahun	Pembahasan
(Yudan & Arief Virgy, 2021)	2021	Implementasi OGD di kota Bandung berdasarkan penelitian ini, berfokus kepada penyediaan data oleh pihak eksternal atau non pemerintahan. Selain itu, pemerintah memiliki beberapa hambatan, seperti aspek data sharing yaitu data yang bersumber dari produsen data non pemerintahan tidak dipublikasikan secara langsung pada portal data, dan pemerintah hanya berperan sebagai penghubung antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Lalu, tidak adanya standarisasi data tentang pengelolaan data, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang data terbuka, dan tidak adanya kesepakatan formal tentang penyediaan data.
(Syafira dkk., 2022)	2022	Penelitian ini membahas tentang penggunaan Aplikasi Real Time Berbagi Informasi (ARIMBI) dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam masyarakat, menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi untuk penggunaan aplikasi kepada masyarakat secara meluas dan hanya terfokus pada kelompok tertentu.
(Almeyna Kurnia dkk., n.d.)	2023	Keterbukaan pemerintah yang dilakukan pada kota Bandung sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan pemerintah melakukan transparansi data kepada publik melalui portal data.bandung.go.id. Penelitian ini menitik-beratkan hambatan yang terjadi tentang pengelolaan teknologi hanya pada sisi Diskominfo dan tidak menjelaskan hambatan yang terjadi dari sisi masyarakat atau dinas lain sebagai pengguna data terbuka. Selain itu, hambatan yang terjadi pada internal dinas, yaitu kurangnya komunikasi, kemampuan staff yang kurang sesuai, alur birokrasi yang berbelit dan pemimpin yang tidak memberikan arahan secara jelas mengenai wewenang tugas pegawai.

Tabel diatas menunjukan tiga penelitian terdahulu yang membahas tentang OGD, dan *e-government* di kota Bandung. Akan tetapi, hanya dua penelitian yang membahas secara spesifik tentang penerapan OGD, namun, pembahasan tersebut hanya terbatas pada kendala di internal organisasi dan non pemerintahan, serta tidak secara jelas membahas tentang kendala yang dialami oleh antar instansi pemerintahan sebagai produsen data. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bernot dkk., 2024) terdapat beberapa aspek yang diperhatikan dalam pengelolaan Satu Data Indonesia, yaitu;

1. **Strategi dan kebijakan**, yaitu terdapat konflik antara birokrasi pemerintahan dengan kebutuhan implementasi OGD, dengan tingkat kebutuhan informasi yang

meningkat tanpa adanya strategi yang komprehensif. Selain itu, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan dan strategi data terbuka, transformasi, serta dampak dalam penggunaan data.

2. **Legislatif**, yaitu terbatasnya pada Peraturan Presiden Nomor.39 tahun 2021 tentang satu data Indonesia, dan memiliki kekurangan dalam melakukan implementasi SDI. Selain itu, terdapat regulasi lain yaitu kedalam satu undang – undang transformasi digital.
3. **Pengaturan organisasi**, yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah pusat terhadap implementasi OGD, yang ditunjukkan dengan terbatasnya staff pengelolaan SDI.

b. Permasalahan teoritis

Mengacu kepada PERPRES Nomor 39 Tahun 2019 pasal 11, pelaksanaan SDI terdapat hambatan teoritis yaitu metodologi tata kelola data belum terstandar, tidak adanya dokumen formal dan fasilitas berbagai pakai. Hal tersebut diperkuat oleh permasalahan praktis yang hanya berdasarkan kepada evaluasi SDI yang terbatas pada aspek internal organisasi dalam hal kebijakan, aplikasi, sumber daya manusia dan berbagi pakai data. Seluruh aspek tersebut belum melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap implementasi OGD, apabila dibandingkan dengan penilaian yang diterapkan pada skala internasional. Seperti negara Inggris menduduki peringkat pertama dengan pengelolaan OGD di dunia yang merupakan bagian dari benua Eropa (European Open Data, 2022), terdapat standar khusus yang digunakan dalam implementasi, yaitu;

1. Kebijakan, yaitu berfokus pada kebijakan dan strategi data terbuka, serta penilaian struktur dan mekanisme tata kelola yang digunakan.
2. Dampak, yaitu mengevaluasi kesediaan, kesiapsiagaan, dan kemampuan untuk mengukur penggunaan kembali dan dampak data terbuka.
3. Portal, yaitu langkah-langkah yang diambil oleh manajer portal data untuk memungkinkan pengumpulan metadata secara sistematis dari seluruh sumber.
4. Kualitas data, yaitu langkah-langkah yang diambil oleh manajer portal data untuk memungkinkan pengumpulan metadata secara sistematis dari seluruh sumber.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan signifikan untuk penilaian OGD antara benua Eropa dengan negara Indonesia. Penelitian terdahulu di Indonesia hanya

berfokus pada aspek kebijakan, dan dampak, sedangkan untuk benua Eropa terdapat aspek penilaian kebijakan, dampak, portal dan kualitas data. Hal tersebut merupakan dasar dari penelitian yang akan dilakukan untuk membuat instrumen penilaian OGD antar instansi, dalam menilai hambatan yang terjadi, terutama pada implementasi pada tingkat daerah, sebelum digunakan pada tingkatan daerah yang lebih tinggi seperti provinsi atau nasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian yang dilakukan terkait evaluasi OGD, yaitu:

1. Merumuskan kriteria keberhasilan dalam penilaian OGD untuk instansi dengan pengelolaan sistem yang optimal.
2. Merancang untuk instrumen penilaian OGD berdasarkan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Perlindungan Data Pribadi (PDP), Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Penyiaran.

1.5 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang dilakukan untuk pengembangan kerangka kerja manajemen data di Indonesia yaitu:

1. Kriteria keberhasilan apa saja yang berpengaruh terhadap implementasi OGD?
2. Bagaimana rancangan untuk instrumen penilaian OGD untuk instansi pemerintahan di Indonesia?

1.6 Lingkup penelitian

Lingkup penelitian untuk pengembangan kerangka kerja OGD yang dilakukan, yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan untuk membuat instrumen manajemen data terbuka antar institusi di Indonesia dengan obyek di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Diskominfo Kota Bandung. Diskominfo dipilih dalam penelitian ini sebagai walidata yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan OGD di tingkat daerah dan DLH dipilih karena ketersediaan instansi berpartisipasi dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Waktu Penelitian

Estimasi untuk melakukan penelitian ini yaitu dari bulan Agustus 2024 – April 2025 untuk menyusun laporan tesis, pengumpulan data dan validasi kepada para pakar atau ahli dalam OGD.

1.7 Batasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Instrumen yang disusun tidak dilakukan diuji coba secara menyeluruh kepada instansi yang dituju untuk mengevaluasi kesesuaian instrumen dengan kebutuhan instansi tersebut.
2. Pengembangan instrumen hanya berdasarkan kepada empat undang – undang yang berlaku di Indonesia yaitu PDP, KIP, ITE dan Penyiaran.
3. Validasi survei penilaian para ahli hanya dilakukan menggunakan validitas Aiken dan ICC.
4. Evaluasi instrumen penilaian OGD hanya diimplementasikan untuk instansi pemerintah dan tidak menilai keterlibatan publik.

1.8 Rasionalitas Penelitian

OGD merupakan konsep yang mengintegrasikan antara pemerintahan terbuka dengan data terbuka, untuk melakukan transparansi data kepada publik tanpa ada batasan apapun. Pada negara Indonesia, OGD dikelola melalui program SDI dengan adanya Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI VI 2020-2022) dalam mewakili komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Akan tetapi, pada pelaksanaan yang dilakukan saat ini, terdapat beberapa hambatan seperti legalitas, hukum dan kerjasama antar organisasi untuk tingkat nasional, selain itu, terdapat beberapa hambatan pada pengelolaan di tingkat daerah, seperti yang telah dipaparkan pada rumusan permasalahan. Akan tetapi, seluruh permasalahan tersebut tidak dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui akar masalah terhadap pengelolaan OGD, dan hanya terbatas pada pengelolaan internal antar organisasi di pemerintah. Jika dibandingkan dengan salah satu perbandingan penilaian yang digunakan pada benua Eropa, dan disusun oleh (European Open Data, 2022), mencakup aspek pengelolaan portal, kualitas data, dampak data terhadap publik dan kebijakan yang berlaku

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan instrumen penilaian yang lebih komprehensif dalam menilai berbagai aspek pengelolaan OGD. Instrumen yang akan disusun, tidak hanya untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan pengelolaan saat ini yang terjadi di instansi daerah, tetapi juga untuk mendorong perbaikan pengelolaan OGD yang efektif dan berkelanjutan. Penyusunan instrumen tersebut dilakukan berdasarkan peraturan atau prosedur yang berlaku dalam pengelolaan data di Indonesia, dan dikombinasikan dengan instrumen penilaian data di Eropa sebagai salah satu benua dengan negara terbanyak yang menduduki peringkat tertinggi dalam pengelolaan OGD.

1.8 Signifikansi Penelitian

Penelitian untuk pengembangan instrumen OGD antar instansi dilakukan berdasarkan signifikansi atas laporan yang telah dipublikasikan oleh tim data Eropa (Patrick de Bas & Martin Page PhD, 2024), tentang dampak penilaian untuk dataset yang berkualitas berdasarkan analisis pada tingkat makro dan mikro dalam kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan. Nilai ekonomi dan dampak terhadap opsi kebijakan terhadap ketersediaan dataset yang berkualitas tinggi atau *High Value Dataset* (HVD) ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. 4 Tahapan Pengukuran Dampak Ekonomi

Berdasarkan gambar diatas, terdapat tiga tahapan dalam pembedaan nilai ekonomi, yaitu:

1. Penentuan baseline yang dilakukan berdasarkan pembelajaran tentang data pasar Eropa tahun 2021 – 2023, pertimbangan hasil sekunder dan temuan dalam pinjaman keamanan utang atau D2/D3/D4/DE, dan perkiraan implementasi dalam jangka waktu lima tahun hingga tahun 2028.
2. Bagian yang dikaitkan dengan HVD yaitu memperkirakan bagian yang terkait dataset bernilai tinggi, dan perkiraan nilai HVD berdasarkan sumber sekunder serta hasil awal.
3. Dampak dari pemilihan kebijakan yang terdiri dari enam domain dataset berkualitas tinggi yang terdiri dari geospasial, observasi bumi dan lingkungan, meteorologis,

statistik, perusahaan dan mobilitas. Selain itu, hasil tersebut menjadi dampak tambahan dalam nilai ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB).

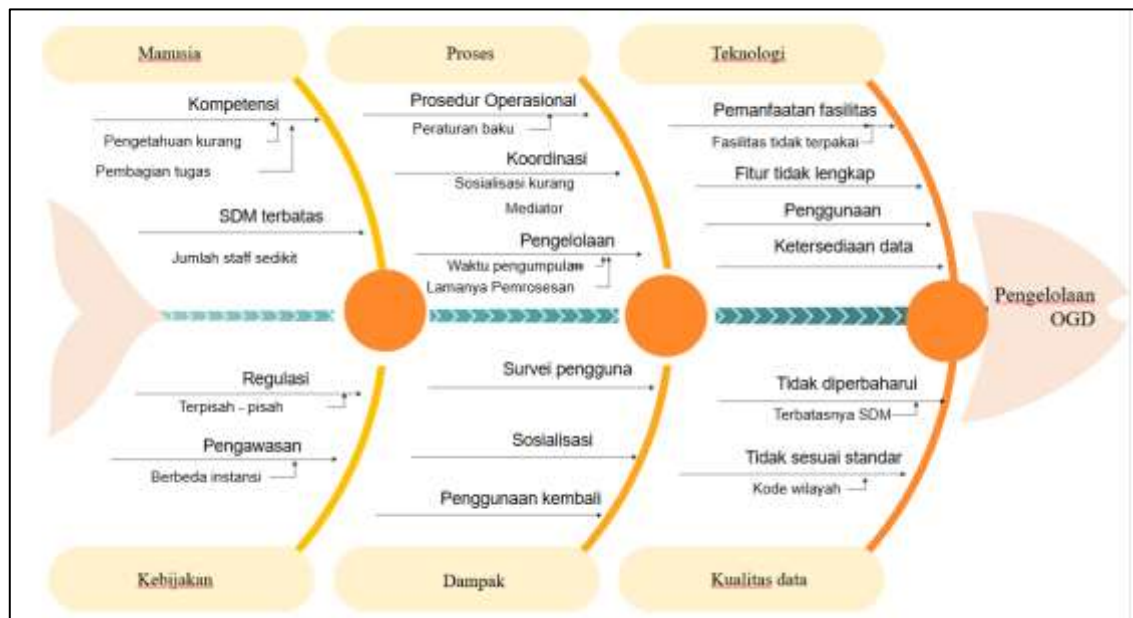
Pada laporan tentang indikator untuk penilaian dampak data terbuka oleh Eropa, menunjukkan manfaat yang terkait data terbuka dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Berikut ini merupakan manfaat dari setiap aspek tersebut, yaitu:

1. Manfaat dalam aspek ekonomi
 - a. PDB dalam nilai total aktivitas ekonomi yang dicapai dalam suatu wilayah, dengan fokus utama pada sektor yang memiliki dampak signifikan dari data terbuka.
 - b. Peningkatan jumlah pekerjaan dengan peran yang bernilai tinggi.
 - c. Peningkatan produktivitas dengan pertumbuhan PDB.
 - d. Penggunaan data dalam menghasilkan produk atau layanan baru yang bernilai tinggi.
2. Manfaat dalam aspek sosial
 - a. Peningkatan fungsi pada sektor publik data terbuka dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan sosial pemerintah.
 - b. Peningkatan pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan dengan adanya kemudahan akses terhadap data, sehingga pembuat keputusan akan memiliki informasi yang beragam untuk membuat keputusan.
 - c. Peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi.
3. Manfaat dalam aspek lingkungan
 - a. Manajemen terkait konsumsi dan pengembangan penggunaan energi.
 - b. Mengurangi emisi lingkungan.
 - c. Peningkatan dalam pembangunan lingkungan seperti penggunaan data terbuka dalam mengatasi permasalahan panas, banjir dan kualitas udara.
 - d. Mengatasi masalah lingkungan dengan membentuk skema pencegahan atau respon terhadap insiden tersebut.

1.9 Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan penelitian tentang implementasi OGD di Indonesia, yaitu tidak adanya penelitian yang secara jelas memberikan solusi untuk pengelolaan data yang efektif dan tidak adanya indikator yang secara rinci dalam menentukan ketercapaian implementasi OGD. Selain itu, peneliti melakukan identifikasi kesenjangan penelitian yang dilakukan, penulis

menggunakan metode *fishbone diagram* (FBD) untuk menentukan hubungan sebab akibat untuk kasus OGD dengan menggabungkan permasalahan pada penelitian terdahulu dengan wawancara awal dan survey singkat terhadap portal data. Penyebab efektif dikategorikan ke dalam tulang ikan utama, dan penyebab berikutnya disebut sebagai tulang ikan Tengah, dengan tulang ikan tengah menggambarkan banyak cabang secara lateral pada kerangka (Tayal dkk., 2021). Gambar dibawah ini menunjukkan sebab dan akibat dari aspek tersebut dalam data terbuka di Indonesia.



Gambar 1. 5 Kesenjangan Penelitian

Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap permasalahan yang telah diilustrasikan dalam *fishbone diagram* diatas untuk permasalahan pengelolaan OGD di Indonesia, pada Tabel 1.4.

Tabel 1. 3 Penjelasan Sebab Akibat Pada Fish Bone Diagram

Kategori	Permasalahan	Akar permasalahan
Manusia	Kompetensi	Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai pengelolaan OGD pada instansi. Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pegawai yang tidak seimbang.
	SDM terbatas	Pengelolaan OGD yang kurang efektif, karena keterbatasan sumber daya manusia pada setiap instansi.
Proses	Prosedur operasional	Tidak adanya peraturan baku yang mengatur validasi dan konten data untuk lintas instansi.
	Koordinasi	Kurangnya sosialisasi kepada publik tentang layananan pemerintah. Walidata hanya berperan sebagai penghubung antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, khususnya pihak ketiga non pemerintahan, sehingga data tersebut tidak dipublikasikan kepada publik.

Kategori	Permasalahan	Akar permasalahan
		Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah.
	Pengelolaan data	Pengumpulan data oleh produsen data dilakukan dalam rentang waktu yang lama, karena berdasarkan dari berbagai sumber berbeda, seperti data laboratorium dan data masyarakat setempat.
		Produsen data sering kali menyerahkan dalam bentuk data mentah, sehingga harus dilakukan pemrosesan hingga menjadi data yang siap untuk dipublikasikan
Kualitas data	Tidak diperbaharui	Produsen data tidak memperbaharui data pada portal secara berkala, karena sumber daya manusia yang terbatas dalam mengelola data tersebut.
	Tidak sesuai standar	Data yang diberikan oleh produsen yaitu DLH kepada Diskominfo yang masih tidak sesuai standar seperti data tidak memiliki kode wilayah dan masih berbentuk laporan.
Dampak	Survei pengguna	Tidak ada survei mengenai penggunaan kembali data, sehingga pemanfaatan data oleh publik tidak dapat diketahui.
	Sosialisasi	Data terbuka yang tidak disosialisasikan secara menyeluruh.
	Penggunaan kembali	Tidak ada pelacakan atas umpan balik yang diberikan pada portal data.
portal	Fitur tidak lengkap	Portal tidak menyediakan fitur untuk melakukan filter seperti jangka waktu, dan pengunduhan dataset secara masal.
	Penggunaan	Tidak adanya mekanisme umpan balik bagi publik terhadap portal data, untuk memberikan saran perbaikan, serta tidak adanya statistik penggunaan untuk setiap dataset yang dipublikasikan.
	Ketersediaan data	koordinasi yang membutuhkan waktu lama antar instansi sehingga ketersediaan data tidak tepat waktu, dan migrasi teknologi yang menyebabkan dataset tidak dipublikasikan secara menyeluruh.
	Pemanfaatan fasilitas	Kurangnya pemanfaatan teknologi yang disediakan oleh walidata tentang penyimpanan data oleh perangkat daerah.
Peraturan	Regulasi	regulasi yang terpisah – pisah, dan setiap instansi memiliki peraturan yang berbeda.
	Pengawasan	Pengawasan untuk implementasi tidak dilakukan secara berkala, karena kurangnya personil, dan tidak ada peraturan untuk pengawasan lintas instansi.

Identifikasi permasalahan tentang pengelolaan OGD di tingkat instansi pada FSD menunjukkan terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi instansi dalam implementasi, akan tetapi pada penelitian terdahulu hanya terbatas pada prosedur kebijakan dan masalah internal antar organisasi. Hal tersebut menunjukkan perbedaan signifikan antara penelitian terdahulu dan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini ditunjukkan untuk mengembangkan instrumen penilaian OG untuk melakukan identifikasi komprehensif dan perbaikan yang berkelanjutan.

1.10 Peran Peneliti

Peran peneliti didalam pengembangan instrumen penilaian OGD antar institusi, yaitu:

1. Membuat rancangan untuk instrumen OGD antara instansi berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Menentukan narasumber atau ahli yang akan berpartisipasi didalam penelitian.
3. Koordinator dalam melakukan wawancara kepada berbagai ahli untuk melakukan validasi intrumen OGD yang telah disusun.

1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan didalam proposal penyusunan thesis ini terdiri lima tahapan seperti yang diuraikan dibawah ini.

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab in menjelaskan secara umum tentang OGD dan faktor – faktor yang mempengaruhinya, serta menjelaskan tentang, gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, pertanyaan, lingkup, batasan, rasionalitas, kesenjangan dan peran peneliti.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode review yang digunakan, dan teori yang digunakan dalam penelitian seperti teori OGD, instrumen yang digunakan dalam melakukan penilaian manajemen data, indikator yang mempengaruhi, perbandingan instrumen, isu dan tren penelitian, dan motivasi penelitian.

C. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang perancangan, model konseptual, sistematika penelitian, asumsi, sumber data, pertimbangan, instrumen, prosedur, bias penelitian, uji keabsahan data.

D. BAB IV DESAIN DAN PENGEMBANGAN

Pengumpulan data dilakukan dengan menentukan prosesdur atau aturan hukum yang berlaku dan berketerkaitan tentang pengelolaan data terbuka, memetakan perancangan instrumen tentang OGD, mengumpulkan data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada para ahli tentang penilaian instrumen yang telah dibuat, serta melakukan wawancara untuk melakukan validasi atas pertanyaan yang telah dibuat.

E. BAB V EVALUASI

Hasil dan diskusi penelitian disajikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini berisi dua bagian, yaitu bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

F. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat atau pertanyaan penelitian.